



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Eselon I Kementerian Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 21 Mei 2024
Waktu	: 13.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Membahas Persiapan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; 2. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 38 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Eselon I Kementerian Sosial RI Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Wakil Ketua DR. H TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Abdul Wachid, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Plt. Inspektur Jenderal, Plt. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Plt. Dirjen Rehabilitasi Sosial, dan Plt. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI dengan agenda “**Persiapan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta Isu-isu Aktual**” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 berdasarkan masing-masing Unit Kerja Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

<u>UNIT KERJA ESELON I</u>	<u>ANGGARAN</u>
<u>Sekretariat Jenderal</u>	<u>643.575.933.000</u>
<u>Inspektorat Jenderal</u>	<u>43.259.329.000</u>
<u>Ditjen Pemberdayaan Sosial</u>	<u>44.449.702.424.000</u>
<u>Ditjen Rehabilitasi Sosial</u>	<u>1.333.370.055.000</u>
<u>Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial</u>	<u>30.718.097.771.000</u>
<u>TOTAL</u>	<u>77.188.005.512.000</u>

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman dengan para Eselon I Kementerian Sosial RI atas Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun 2025.

2. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Plt. Inspektorat Jenderal, Plt. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Plt. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mendorong perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terintegrasi dan menyeluruh agar penyaluran bantuan sosial tidak menimbulkan masalah di lapangan.
 - b. Memastikan penyaluran program-program bantuan sosial di Kementerian Sosial RI dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
 - c. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengawasan internal agar dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan anggaran.
 - d. Mengusulkan peningkatan insentif para pendamping sosial agar sesuai dengan standar dan kebutuhan di daerah.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan ekonomi dan graduasi agar memberikan hasil yang maksimal.

- f. Mendorong Kementerian Sosial RI untuk tetap mempertahankan program-program strategis dengan target jumlah minimal sama dengan tahun anggaran 2024.
- g. Terkait dengan tambahan anggaran akan dibahas lebih lanjut pada pendalaman Pagu Indikatif Kemensos RI Tahun 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag